

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

POLICY BRIEF TAHUN 2023

AKSELERASI KEBERHASILAN PROGRAM VOKASI DI PROVINSI RIAU



PENDAHULUAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, pemerintah terus berupaya menyelenggarakan program-program untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peningkatan kualitas sumber daya dimaksud bertujuan guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia terampil dan kompeten pada level menengah yang dapat mendukung pertumbuhan melalui ekonomi nasional SMK. Fasilitasi kebekerjaan lulusan SMK menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan keberhasilan program vokasi melalui jumlah serapan lulusan SMK yang telah dibekali dengan keterampilan dapat berkarya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) yang ada di Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 telah mengatur penyelenggaraan bimbingan konseling bimbingan karir di satuan pendidikan sesuai dengan implementasi pelaksanaan kurikulum 2013. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Vokasi yaitu pendidikan menengah yang menyiapkan peserta pendidik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu.

Program Vokasi memiliki peran strategis untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh DUDI. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang selaras atau *link and match* dengan kebutuhan DUDI, Pemerintah Provinsi Riau mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan rekomendasi strategi akselerasi keberhasilan program vokasi di Provinsi Riau.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi pioner dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2022 dalam mendukung Program Menara Vokasi yang merupakan titik balik bersinerginya seluruh pemangku kepentingan mulai dari satuan pendidikan vokasi, Pemerintah Daerah, industri, hingga media massa untuk bersama-sama mewujudkan *link* and *match* yang diharap akan memberikan dampak keekonomian. Indikator keberhasilan program vokasi adalah daya serap tenaga kerja meningkat. Untuk itu dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang dijalankan oleh berbagai pihak guna akselerasi keberhasilan program vokasi di Provinsi Riau. Kebijakan yang direkoemnadsikan yaitu memperkuat link and macth dengan dunia indutri, meningkatkan peran DUDI dalam akselerasi keberhasilan program vokasi, optimalisasi peran sekolah dan Bimbingan Karir melalui BKK dan mengarahkan minat dan bakat siswa sejak dari pendidikan menengah pertama sebelum memasuki SMK.

TIM PENYUSUN

Syartiwidya, T. Marlina, Candra Sari Mutiara, Karyati, M. Yunus, Kori Cahyono, M. Azza Faroni, Neil Yulia, M. Ikhsan, Dini Gustiza

DISKRIPSI MASALAH

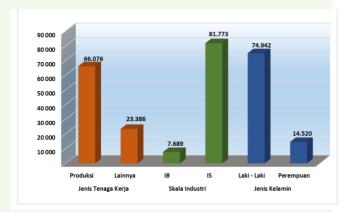
Provinsi Riau memiliki banyak industri-industri besar yang sangat potensial di sektor ekonomi nasional. Oleh sebab itu, adanya Peraturan Gubernur tentang vokasi menjadi sebuah instrument bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kemitraan dengan DUDI.

Policy Brief

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang terjadi pada siswa SMK dalam rangka persiapan memasuki dunia kerja diantaranya siswa belum mampu mengembangkan karirnya ketika sudah memilih jurusan sesuai dengan yang dipilih di sekolah, belum siap ketika memasuki dunia kerja dan belum mengambil keputusan terus melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi atau bekerja. Tidak hanya itu, kemampuan orang tua baik dukungan maupun ekonomi keluarga sekaligus lingkungan kehidupannya menjadi permasalahan yang dihadapi siswa SMK dalam menentukan langkah masa depan.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 03 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020 menyatakan bahwa BKK yang ada di SMK selain penempatan lulusan, juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia usaha/industri terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia usaha/industri, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan. Fungsi tersebut bisa dicapai melalui pemasaran tamatan atau job matching. Dengan menyelenggarakan job matching, dapat menjembatani antara pencari kerja lulusan pendidikan vokasi dengan Penyedia lapangan kerja. BKK menjadi komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya di SMK.

Potensi dunia usaha di Provinsi Riau sangat besar karena Provinsi Riau termasuk provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di wilayah Sumatera, sehingga arus urbanisasi ke Provinsi Riau tergolong sangat tinggi. Usaha yang mempunyai potensi cukup besar di Provinsi Riau antara lain yaitu, usaha kuliner, laundri, penginapan, rental mobil, dan berbagai usaha online. Usaha yang berkembang saat ini umumnya merupakan UMKM.



Gambar 1. Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis, Skala Industri, dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2019

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 89.462 orang yang terdiri dari tenaga kerja produksi sebanyak 66.076 orang, tenaga kerja lainnya sebanyak 23.386 orang, sehingga bila dirata rata pekerja per perusahaan sebanyak 244 orang. Jika dilihat dari skala industri, jumlah industri besar pada tahun 2019 adalah sebanyak 228 perusahaan dengan rata-rata pekerja sebanyak 359 orang sedangkan banyaknya industri sedang adalah 138 perusahaan dengan rata-rata pekerja sebanyak 56 orang. Berdasarkan jenis kelamin, penyerapan tenaga kerja laki-laki mencapai 83,77 persen dan tenaga kerja perempuan hanya 16,23 persen (Gambar 1).

Kelompok perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Riau yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja adalah kelompok industri makanan yaitu sebesar 67,74 persen. Pada tahun 2019, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 18.503 orang atau 20,68 persen dari seluruh tenaga kerja di industri besar dan sedang di wilayah Provinsi Riau.





TRACER STUDI LULUSAN TAHUN 2021 250 200 150 0 SMK N 3 SMK N 7 SMKN PERTANIAN SMK MUHAMMADIYAH I Diterima Kerja Melanjutkan Studi Wira Usaha

Policy Brief

Kajian ini dilaksanakan di 3 SMK Negeri dan 1 SMK swasta yang ada di Kota Pekanbaru yang merupakan SMK PK (Pusat Keunggulan), yaitu SMKN 3, SMKN 7, SMKN Pertanian dan SMK Muhammadiyah I. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dan analisis mendalam terhadap kepala sekolah, guru dan *tracer study* lulusan SMK yang menjadi lokus diketahui bahwa lulusan yang paling banyak diterima bekerja adalah SMK N 3 dan SMK Muhammadiyah I, sedangkan lulusan yang banyak melanjutkan pendidikan adalah lulusan dari SMK Pertanian. Untuk SMK N 7 yang diterima bekerja dan melanjutkan pendidikan tidak jauh berbeda.

Analisis terhadap bimbingan karir menunjukkan bahwa 52,7% siswa merasakan cukup mendapatkan bimbingan karir dari sekolah, hal ini menunjukkan bahwa bimbingan karir yang diberikan belum optimal dalam membimbing dan mengarahkan siswa untuk siap dalam memasuki dunia kerja.

Sedangkan analisis terhadap minat dan kesiapan siswa menunjukkan bahwa 53,1% siswa mempunyai minat dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang masuk ke SMK merupakan siswa yang mempunyai minat untuk langsung bekerja. Sejalan dengan tracer studi tahun 2020 dan 2021 bahwa SMK 3 dan SMK Muhammadiyah I menghasilkan siswa-siwa yang siap dan memiliki minat untuk bekerja (Gambar 2).

Analisis regresi menujukkan bahwa Bimbingan Karir yang dilakukan memberikan kontribusi terhadap minat dan kesiapan kerja siswa sebesar 22,6%. Berdasarkan hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa bimbingan karir yang diberikan belum optimal.

REKOMENDASI

- 1. Memperkuat *link and macth* dengan dunia indutri melalui :
 - a. Penyelarasan kurikulum; pembelajaran berbasis proyek; serta Pendidik atau instruktur dari industri (DUDI)
 - b. Perlu dilakukan magang guru guna membah pengetahuan di lapangan
 - c. Magang/praktek kerja lapangan bagi siswa di DUDI lebih lama (3-6 bulan) sesuai kebutuhan.

- 3. Optimalisasi peran sekolah dan Bimbingan Karir melalui BKK dengan strategi
 - a. Mengembangkan Modul minat dan pemahaman Siswa SMK dalam memasuki dunia kerja
 - b. Menyelenggarakan *job matching*, yang dapat menjembatani antara pencari kerja lulusan pendidikan vokasi dengan Penyedia lapangan kerja melalui kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja.

- 2. Meningkatkan peran DUDI dalam akselerasi keberhasilan program vokasi, melalui :
 - a. Memberikan peta kebutuhan tenaga kerja di perusahaan
 - b. Memberi kesempatan magang/praktek siswa sesuai kebutuhan dengan perjanjian penempatan kerja bagi yang berprestasi
 - c. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menerima tenaga kerja lulusan dari SMK

4. Mengarahkan minat dan bakat siswa sejak dari pendidikan menengah pertama sebelum memasuki SMK melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/kota yang berwenang terhadap SLTP untuk membuat kebijakan bimbingan karir bagi siswa kelas IX

Policy Brief

REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Conny R. Semiawan. 1999. Perkembangan dan Belajar Peserta Didik. Depdikbud.

Irwanto. (2015). Studi Komparasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Efektif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi. STKIP. Garut. Halaman 52-67

Kartadinata, S. (2015). "Revolusi Pendidikan". (Harian Umum Pikiran Rakyat, Sabtu 2 Mei 2015 Halaman 28).

Luddin, A. B. M. (2014). Kinerja Kepala Sekolah Dalam Kegiatan Bimbingan Dan Konseling. Jurnal Ilmu Pendidikan, 19(2). https://doi.org/10.17977/jip.v19i2.4216

Putri, R. M., S, N., & Daharnis, D. (2014). Pengembangan Modul Bimbingan dan Konseling untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Jurnal Konseling Dan Pendidikan, 1(2), 121–135. https://doi.org/10.29210/120%y

Santosa, H. (2013). Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial untuk Mengembangkan Perilaku Seksual Sehat Remaja (Studi Pengembangan di Sekolah Menengah Atas SMA Kartika Siliwangi 1 Bandung). Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v2i1.2455

Sharf, R. (1992). Applying Careeer Development Theory to Counseling. California: Brooks/ Cole Publishing Company.

Sukardi, D.K. (1984). Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah. GI. Denpasar.

Sudira, P. (2011). Praksis Ideologi Tri Hita Karana dalam Pembudayaan Kompetensi pada SMK di Bali. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Walgito, B. (2005) Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir). CV Andi Offset. Yogyakarta.

Super, D. S. 1992. Applying Career Development Theory to Counseling. USA: Brooks/Cole Publishing Company.

Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Riau BPS tahun 2019